

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dengan baik merupakan masalah yang tetap ada di Negara Indonesia ini. Permasalahan tersebut menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, penegakan hukum yang sulit berjalan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Hal ini membuat masyarakat menuntut adanya suatu tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* ini diharapkan dapat mengubah pemerintahan menjadi lebih transparan, berkeadilan, dan akuntabel.

*Governance* disini diartikan sebagai mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik (Sumarto: 2002). Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi masyarakat sipil dan sektor swasta ikut aktif melakukan upaya tersebut.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga dalam

penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun prinsip-prinsip dari *good governance* ini antara lain : partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada *stakeholder*, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis. Apabila keseimbangan prinsip-prinsip tersebut diterapkan, maka dapat memudahkan organisasi sektor publik dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada masyarakat.

Namun, maraknya isu *good governance* ini sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak sejalan dengan apa yang diharapkan masyarakat. Seperti masalah pendidikan di Sumatera Utara yang disebutkan oleh Ketua Komite SMK BI Frengki (Analisa: 21September 2011) yang menyatakan bahwa sistem desentralisasi pendidikan membingungkan siswa dan masyarakat, tingkat korupsi semakin tinggi, tidak adanya komitmen bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Selain itu seperti yang dilansir ORBIT pada 26 Juni 2012 bahwa pemenang tender alat peraga Informasi Teknologi (IT), pengadaan buku setingkat SMP, SMU, dan SMK di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara (Sumut) senilai Rp16 miliar tahun 2012 terindikasi ditukangi.

Adanya masalah seperti ini dikarenakan kurangnya komitmen dan kinerja pemerintah dalam melaksanakan *good governance*. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu organisasi pemerintah daerah yang

merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi, maka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat melaksanakan *good governance*. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara harus menjadi suatu organisasi yang mempunyai kinerja yang baik agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Dalam mencapai sasaran yang diinginkan, informasi tentang kinerja menjadi hal yang penting. Informasi tentang kinerja dapat digunakan mengevaluasi apakah kinerja suatu organisasi sudah tepat sasaran atau belum.

Penelitian ini merupakan penelitian persepsi. Persepsi maksudnya sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka (Simbolon: 2008).

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana (2012), yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Kinerja Organisasi”. Nurdiana (2012) melakukan penelitian tersebut pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara. Nurdiana (2012) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap kinerja organisasi Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan kategori sedang. Tetapi, penelitian ini dilakukan di waktu dan objek yang berbeda, yaitu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pelaksanaan Good**

## **Governance terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Apakah pelaksanaan *good governance* telah terselenggara dengan baik pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara?
- b. Apakah pelaksanaan *good governance* dapat meningkatkan kinerja organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara?
- c. Apakah pelaksanaan *good governance* berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara?
- d. Seberapa besar pelaksanaan *good governance* mempengaruhi kinerja organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis hanya meneliti pelaksanaan *good governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Apakah Terdapat Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara?”

## 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir serta memecahkan masalah secara sistematis dan teoritis sehingga diperoleh kesimpulan yang teruji dan berguna.

### b. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

### c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, bahan kajian, dan bahan perbandingan bagi para akademisi.